

**RENCANA AKSI POKJA PUU 2018
BULAN JULI 2018**

NO	POKJA	RENCANA AKSI		PROGRESS CAPAIAN	KETERANGAN
		BULAN	PROGRAM		
	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	JULI			
			inventarisasi, analisa, dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang Kominfo	Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kominfo yang akan dilakukan simplifikasi, total berjumlah: a. 153 PM dicabut; b. 1 RUU, 1 RPP, dan 12 PM (yang akan dibentuk),	
			analisa dalam rangka deregulasi/simplifikasi Peraturan Menteri (PM)	Penyiapan Bahan Analisa terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kominfo yang akan simplifikasi, saat ini telah disusun RPM Kominfo tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Kominfo total berjumlah 27 Peraturan Menteri	
			evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka simplifikasi, melalui evaluasi triwulan 2018	Penyiapan Bahan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kominfo RPM Kominfo tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Kominfo total berjumlah 27 Peraturan Menteri	
			Melakukan harmonisasi dan penyusunan terhadap regulasi	Harmonisasi dan Penyusunan terhadap: 1. Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Komunikasi dan Informatika; 2. Pembahasan terhadap Rancangan tentang Perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945; 3. Rancangan Peraturan Menteri tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika	
			Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan Amanat Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Pembahasan terhadap Rancangan tentang Perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 Pembahasan terhadap Penyusunan RPM NSPK IKP dan Aptika amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	
	Melakukan FGD dan konsultasi publik melalui website untuk melibatkan publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	Pembahasan terhadap Rancangan tentang Perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 Pembahasan terhadap Penyusunan RPM NSPK IKP dan Aptika amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015			